BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Seputar Masyarakat Multikultural

a. Pengertian Masyarakat

Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Sosiologi juga mempelajari perilaku manusia sebagai anggota masyarakat dan sekaligus masyarakat sebagai perwujudan dari pergaulan hidup bersama manusia. Masyarakat sebagai wadah persemaian, pertumbuhan dan perkembangan budaya manusia, wujudnya berupa kelompok-kelompok atau organisasi sosial.

Dalam pengertian istilah, banyak definisi tentang masyarakat yang diberikan oleh para ahli, antara lain seperti yang dinyatakan oleh:[8]

a) Mac Iver dan Page, mengatakan bahwa "Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan

[8] Soerjono Soekanto, *Op-Cit*, hal 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, yang selalu berubah".

b) Ralp Linton, mengatakan bahwa "Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas".

c) Selo Soemardjan, mengatakan bahwa "Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan".

Meskipun terdapat perbedaan redaksional dalam definisi tentang masyarakat seperti telah disebutkan, namun pada hakekatnya pengertian masyarakat mencakup ciri-ciri:

1) Adanya sejumlah orang (manusia).
2) Mendiami daerah tertentu (ada batas-batas wilayah yang jelas).
3) Mempunyai warisan sosial (*social heritage*) dan kebudayaan.
4) Mempunyai rasa kesatuan.

Beberapa definisi dan penjelasan di atas dapat memberikan gambaran yang jelas terkait pengertian masyarakat. Setelah mengetahui bahwa unsur masyarakat adalah kompleks dan penuh dinamika, maka akan terbahas berikutnya terkait hal yang melekat atas masyarakat, yaitu tentang multikultural atau multikulturalisme atau keaneka ragaman budaya dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengertian Multikultural

Berbicara tentang multikulturalisme tentunya tidak akan terlepas dari kultural dan pluralisme. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai kata kultur (budaya), pluralisme, dan bahkan multikultural. Dalam skripsi ini akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan multikultural. Adapun beberapa penjabaran mengenai definisi multikultural, sebagai berikut:

1) Multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan, "akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia". Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural ini telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.[9]

2) Menurut Bhikhu Parekh, baru sekitar 1970-an gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama.[10]

3) Pengkajian tentang hal yang bersifat multikultural, tidak bisa dipisahkan dengan akar kata multikultural itu sendiri. Yaitu kultur atau budaya. Soerjono Soekanto mendefinisikan tentang budaya. Yaitu dalam bentuk baru yaitu kebudayaan. Menurut beliau kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian diterangkan bahwa, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuau yang dipelajari

---

[9]http://pustakawan.pnri.go.id/uploads/media/5/PERPUSTAKAANDANPENDIDIKANMULTIKULTURALISME.doc. (di akses tanggal 11 April 2009)

[10] http://nashir6768.multiply.com/journal/item/1 (di akses tanggal 14 Desember 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.[11]

Jelas bahwa inti dari multikultural adalah keaneka ragaman kebudayaan. Seperti pada masyarakat Muharto di RW VIII di mana terdapat 2 suku bangsa yang berbeda, yakni Jawa dan Madura. Perbedaan budaya di masyarakat Muharto tidak sampai menjadi sebagai sebuah konflik, tetapi lebih bagaimana mencoba saling menerima satu sama lain untuk memunculkan kebudayaan baru agar tidak ada kekacauan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

c. Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultur merupakan bentuk masyarakat yang ditandai oleh keragaman etnik, ras, pemikiran dan agama. Terbentuknya masyarakat multikultur dikarenakan tingkat mobilitas penduduk yang begitu tinggi. Anggota masyarakat tidak lagi hidup kelompok etnisnya yang memiliki kebudayaan yang sama. Anggota masyarakat mulai bertemu dengan kelompok budaya yang lainnya. Implikasi dari semua itu adalah pemahaman akan perbedaan budaya menjadi penting.[12]

Di Indonesia, terdapat berbagai macam kebudayaan yang berasal dari hampir seluruh sukubangsa. Hal ini mungkin terwujud sebagai masyarakat multikultural, apabila warganya dapat hidup berdampingan, toleransi dan saling menghargai. Nilai budaya tersebut

---

[11] http://simuhkendal1987.wordpress.com/ (di akses tanggal 14 Desember 2009)

[12] Sugeng Pujileksono, *Petualangan Antropologi Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, (Malang: UMM Press, 2006), hal 189-190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hanya sebuah wacana, tetapi harus menjadi patokan penilaian atau pedoman etika dan moral dalam bertindak yang benar dan pantas bagi orang Indonesia. Nilai tersebut harus dijadikan acuan bertindak, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun tindakan individual.

Keragaman budaya dalam masyarakat multikultur, seperti di Indonesia tentu saja akan memunculkan adanya saling silang atau tukar budaya antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa juga memunculkan perubahan kebudayaan atau kebudayaan baru.

Perubahan kebudayaan dapat dilihat dengan bagaimana warga negara berbuat sesuatu yang bermakna (sebagai suatu proses) dan apa hasil perbuatan tersebut (produk/akibat). Ketika perbuatan dan hasilnya dicitrakan melekat pada kebersamaan suatu bangsa, maka disebut sebagai kebudayaan nasional. Persoalannya, kebudayaan nasional perlu ditempatkan sebagai bagian dalam arus besar perubahan kebudayaan dunia, yang dipengaruhi oleh semangat (spirit) neoliberalisme. Pengadopsian budaya global ini tentu tidak dapat terhindarkan, dimana terdapat fenomena, bahwa pada pemerintahan negara yang korup umumnya didukung oleh kekuatan ekonomi global juga, dimana negara tersebut dijamin memasuki pasar ekonomi global (global economy market). Bagi sebagian besar elit penguasa, kondisi ini sangat menguntungkan, karena tidak diperlukan upaya untuk membangun budaya bangsa, hingga pada akhirnya, mereka dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi konsumen sekaligus sebagai korban budaya warisan leluhur bangsa dan budaya global. Diakui, kebudayaan merupakan penerapan kehidupan warga negara dalam berperilaku sehari-hari.[13]

Fenomena apatisme masyarakat terhadap pemilu legislatif yang terjadi di Indonesia merupakan bentuk dari perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang muncul akibat kekecewaan, karena tidak adanya perubahan signifikan bagi upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat reformasi tahun 1998, harapan masyarakat akan perubahan begitu mengemuka. Namun, kepentingan elit penguasa sama sekali tidak membawa harapan dan tidak bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat kemudian putus asa dan kehilangan kepercayaan pada politisi.

Keputusan memilih dalam pemilu legislatif lebih dipengaruhi semangat budaya dan keagamaan (*Cultural and Religious Spirit*), dan terbentuk polarisasi masyarakat, khususnya di Jawa, yang pada dasarnya masih mengikuti prinsip aliran. Hal lain yang biasa mempengaruhi masyarakat dalam penentuan pilihan adalah kuatnya peran pimpinan lokal, seperti lurah atau kepala desa (kepala kampung).

Dewasa ini, perilaku politik masyarakat mengalami perubahan, di mana kemajuan teknologi modern mampu mendistribusikan informasi dan ilmu pengetahuan hingga ke pelosok daerah terpencil dalam waktu singkat, hingga mengakibatkan adanya perubahan

---

[13] http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Feedback&op=printpage&opid=1210 (di akses tanggal 14 Desember 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paradigma berpikir masyarakat dalam proses pembelajaran dan pendidikan berpolitik. Situasi dan kondisi yang lebih bebas serta masyarakat yang semakin kritis pada akhirnya juga menyebabkan pemilih lebih rasional dalam menentukan pilihannya. Masyarakat lebih mampu melihat citra (*image*) dan performa kualitas kepemimpinan nasional yang dimiliki para elit penguasa serta kinerja partai politik dalam sistem politik Indonesia saat ini.

Hal ini menunjukkan perubahan budaya dalam masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihan politiknya, turut serta mempengaruhi perubahan sistem kekuasaan yang ada. Ruang demokrasi yang telah dibuka lebar merupakan salah satu faktor munculnya perubahan budaya dalam berpolitik di masyarakat.

Bagi masyarakat Indonesia yang telah melewati reformasi, masyarakat multikultural bukan hanya sebuah wacana atau yang dibayangkan. Tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, konsep multikultural ini tidak henti-hentinya untuk selalu dikomunikasikan di antara ahli sehingga ditemukan kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini.

Multikultural memberi penegasan, segala perbedaan itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Dengan kata lain, adanya komunitas yang berbeda saja tidak cukup, sebab yang terpenting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas itu diperlakukan sama oleh negara. Adanya kesetaraan dalam derajat kemanusiaan yang saling menghormati, diatur oleh hukum yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan dan menjamin kesejahteraan hidup warganya.

2. Seputar Pemilu Legislatif

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu Legislatif merupakan pesta demokrasi yang menjadi momentum bagi pemilih yang sudah punya hak pilih untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang tugasnya untuk mendengar, membela dan melayani aspirasi rakyat yang memilihnya. Di Indonesia anggota legislatif berkedudukan mulai tingkat pusat (nasional), propinsi dan kota/kabupaten. Tugas-tugas yang harus dikerjakan adalah membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi objektif yang ada di negaranya dan juga bertugas untuk mengontrol kinerja pemerintah.[14]

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007,

---

[14] http://pustakawan.pnri.go.id/uploads/media/5/PERPUSTAKAANDANPENDIDIKANMULTIKULTURALISME.doc. (di akses tanggal 12 Juni 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.[15]

B. Kajian Teoritis

1. Paradigma Definisi Sosial

Exemplar paradigma ini ialah karya Max Weber tentang 'tindakan sosial'. Weber tertarik kepada makna subjektif yang diberikan individu terhadap tindakan mereka. Ia memusatkan perhatian kepada intersubjektif dan intrasubjektif dari pemikiran manusia yang menandai tindakan sosial. Weber tak tertarik untuk mempelajari fakta sosial yang bersifat makroskopik seperti struktur sosial dan pranata sosial. Perhatiannya lebih mikroskopik. Baginya yang menjadi pokok persoalan sosiologi adalah proses pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial. Jadi yang menjadi sasaran penyelidikannya ialah pemikiran-pemikiran yang bersifat intrasubjektif dan intersubjektif dari aksi dan interaksi sosial. Untuk mempelajari fenomena demikian Weber menyarankan untuk menggunakan metode interpretative-understanding atau yang lebih dikenal sebagai metode verstehen. Walaupun sebagian karya Weber ditempatkan sebagai exemplar dari paradigma definisi sosial,

---

[15] http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia (di akses tanggal 11 April 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun sebagian karya terbesarnya termasuk ke dalam paradigma fakta sosial. Ia seperti juga Durkheim tak begitu kena digolongkan ke dalam salah satu paradigma tertentu, karena keduanya lebih tepat dikatakan sebagai 'jembatan paradigma'.[16]

Penganut Paradigma Definisi Sosial cenderung mempergunakan metode observasi dalam penelitian mereka. Alasannya adalah untuk dapat memahami realitas *intrasubjective* dan *intersubjective* dari tindakan sosial dan interaksi sosial. Penganut Paradigma ini sangat tertarik kepada tindakan manusia yang spontan dan sikap yang wajar. Untuk maksud tersebut metode kuisioner dan interview dinilai kurang relevan. Begitu pula metode eksperimen. Metode ini meskipun dapat diterapkan tetapi jarang diterapkan. Alasannya karena metode ini dapat mengganggu spontanitas tindakan serta kewajaran dari sikap si aktor yang diselidiki. Melalui penggunaan metode observasi dapat disimpulkan hal-hal yang bersifat intrasubjective dan intersubjective yang timbul dari tindakan aktor yang diamati.[17]

2. Perspektif Tindakan Sosial Max Weber

Secara definitif Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama konsep tindakan sosial. Kedua konsep tentang penafsiran dan

---

[16] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 89-90

[17] *Ibid*, hal 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama. Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.[18]

Menurut Weber, perilaku manusia yang merupakan perilaku sosial harus mempunyai tujuan tertentu, yang terwujud dengan jelas. Artinya, perilaku itu harus mempunyai arti bagi pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian nerorientasi terhadap perilaku yang sama pihak lain. Perilaku yang bersifat introspektif seperti meditasi, atau perilaku yang berorientasi terhadap objek atau situasi materiil bukanlah merupakan perilaku sosial.[19]

Max Weber menempatkan konsep tindakan individual yang bermakna pada pusat teorinya tentang masyarakat. Bagi Weber ciri yang mencolok dari hubungan-hubungan sosial adalah kenyataan bahwa hubungan-hubungan tersebut bermakna bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Dia percaya bahwa kompleks hubungan-hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat dapat di mengerti hanya dengan mencapai sebuah pemahaman mengenai segi-segi subjektif dari kegiatan-kegiatan antar pribadi dari para anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, melalui analisis atas berbagai macam tindakan manusialah kita

---

[18] George Ritzer, *Op.Cit*, hal 38

[19] Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh pengetahuan mengenai ciri dan keanekaragaman masyarakat-masyarakat manusia.[20]

Weber membedakan tindakan dari tingkah laku pada umumnya dengan mengatakan bahwa sebuah gerakan bukanlah sebuah tindakan kalau gerakan itu tidak memiliki makna subjektif untuk orang yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa seorang pelaku memiliki sebuah kesadaran akan apa yang sedang ia lakukan yang bisa dianalisis menurut maksud-maksud, motif-motif dan perasaan-perasaan sebagaimana mereka alami. Jadi, tindakan berbeda dari segi-segi yang sama sekali mekanis dari fungsi badaniah, seperti proses pencernaan, yang tidak memiliki 'acuan intensional' apapun.[21]

Dengan membuat distingsi (perbedaan) antara tindakan dan gerakan belaka ini, Weber menyarankan bahwa tindakan bersifat sosial sejauh, berdasarkan atas makna subjektif yang dilekatkan padanya oleh individu-individu yang bertindak, tindakan itu memperhitungkan tingkah laku orang-orang lain dan dengan cara itu pelaksanaannya terarah. Rumusan ini mengecualikan tindakan-tindakan yang lebih terarah menuju benda-benda daripada orang-orang, jika benda-benda ini tidak memiliki makna bagi tindakan-tindakan orang lain, sebagaimana terjadi dalam pekerjaan pabrik yang dilakukan sendiri di mana maksudnya adalah menjual produk itu. Tindakan sosial, dengan demikian, merupakan sesuatu yang lebih daripada sekedar kesamaan diantara tingkah laku

---

[20] Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian, Perbandingan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal 199

[21] *Ibid*, hal 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak orang (tingkah laku massa) walaupun tak perlu mengandung kesadaran timbal balik karena satu orang bisa bertingkah laku dengan sadar menuju orang lain tanpa yang lainnya itu sadar akan fakta ini. Tetapi tindakan sosial memang menuntut bahwa sekurang-kurangnya satu peserta memberi makna untuk tingkah lakunya menurut pengalaman-pengalaman subjektif orang lain, yaitu berkenaan dengan maksud-maksud, motif-motif atau perasaan-perasaan orang lain.[22]

Perilaku manusia sebagai perilaku sosial harus mempunyai tujuan tertentu, yang terwujud dengan jelas. Artinya, perilaku itu harus mempunyai arti bagi pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian berorientasi terhadap perilaku yang sama pihak lain. Tipe perilaku ideal cara memberikan tekanan sepihak serta intensifikasi terhadap atau beberapa aspek suatu peristiwa yang mencerminkan struktur mental yang seragam. Tipe hubungan sosial terdiri atas:

a. Tipe perjuangan suatu bentuk hubungan sosial yang menyangkut individu sedemikian rupa sehingga salah satu pihak memaksakan kehendaknya terhadap perlawanan pihak lain.
b. Tipe komunikasi meruapkan hubungan sosial yang didasarkan pada perasaan subyektif, baik yang bersifat emosional atau tradisional atau kedua-duanya.
c. Tipe agregasi merupakan hubungan sosial yang didasarkan pada keserasian motivasi rasional atau keseimbangan berbagai kepentingan.

---

[22] *Ibid*, hal 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kelompok korporasi merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang berkaitan dengan wewenang yang dilaksanakan pada kegiatan seorang pemimpin dan suatu staf administrasi.[23]

Pemahaman atau *vestehen*, suatu perilaku yang mungkin mempunyai arti tertentu, terlepas dari apakah seseoarng atau beberapa orang terlibat dengannya, serta memberikan arti tertentu pada perilaku tersebut. Walaupun proses pemahaman bersifat subjektif, namun seseorang yang terlibat di dalamnya dapat memberikan derajat objektivitas tertentu yang diperlukan. Ada dua cara untuk mendapatkan pemahaman :

a. Suatu tipe perilaku dapat dipahami artinya secara intelektual, apabila perilaku itu rasional.
b. Suatu pemahaman diperoleh dengan mempergunakan perasaan bila perilaku itu bersifat irasional.[24]

Bagi Weber pentingnya "pemahaman" dalam arti teknis murni adalah bahwa hal itu memberikan petunjuk pada pengamatan dan penafsiran teoritis terhadap kejiwaan subjektif manusia yang sedang dipelajari perilakunya. Dengan kata lain, "pemahaman" merupakan sarana penelitian sosiologis yang bertujuan untuk memberikan pengartian yang lebih mendalam, mengenai hubungan antara keadaan tertentu dengan proses perilaku yang terjadi. Dengan mempergunakan pengartian "pemahaman" tersebut peneliti akan dapat mengetahui mengapa suatu aksi

---

[23] http://gussri.blogspot.com/2008/05/max-weber.html (di akses tanggal 12 Mei 2009)

[24] http://gussri.blogspot.com/2008/05/max-weber.html (di akses tanggal 12 Mei 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dan mengapa suatu pola perilaku tertentu mengikuti secara sinambung. Dengan cara demikian penelitian terhadap motivasi diperkenalkan sebagai sesuatu yang mendasari setiap penafsiran sosiologis. Pemahaman secara fungsional belaka mungkin cukup bagi ilmu pengetahuan alam, akan tetapi tidak demikian halnya dengan ilmu-ilmu sosial, yang harus meneliti sebab-sebab dan proses selanjutnya dari suatu perilaku sosial.[25]

Pemahaman itu bisa terdiri dari sebuah pemahaman intelektual langsung atas apa yang sedang terjadi (seperti dalam kasus proses logis seperti tambahan ilmu hitung) dengan menimbulkan, melalui empati, perasaan-perasaan si pelaku atau dengan menarik dari pengandaian-pengandaian kita sendiri mengenai apa yang memotivasi orang dalam situasi macam itu.[26]

3. Tipe-tipe Tindakan Sosial Max Weber

Kalau tindakan sosial itu harus dimengerti dalam hubungannya dengan arti subyektif yang terkandung di dalamnya, orang perlu mengembangkan suatu metoda untuk mengetahui arti subyektif ini secara obyektif dan analitis. Dalam keadaan tidak ada metode seperti itu, kritik-kritik terhadap pelbagai pendekatan subyektif benar yang mengatakan bahwa aspek-aspek pengalaman individu yang tidak dapat diamati tidak dapat dimasukkan dalam suatu analisa ilmiah mengenai perilaku manusia. Namun bagi Weber, konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu

---

[25] Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 11

[26] Tom Campbell, *Op-Cit*, hal 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisa obyektif mengenai arti-arti subyektif dan juga merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti-arti subyektif dan merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda.

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Pembedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan *rasional* dan yang *nonrasional*. Singkatnya, tindakan rasional (menurut Weber) berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Di dalam kedua kategori utama mengenai tindakan rasional dan nonrasional itu, ada dua bagian yang berbeda satu sama lain.

Tidak setiap tipe hubungan antar manusia mempunyai ciri sosial, namun hanya apabila perilaku indvidu tersebut secara berarti berorientasi pada perilaku pihak-pihak lain. Misalnya terjadi tabrakan kendaraan di jalan, itu merupakan musibah/peristiwa sendiri. Di lain pihak setiap usaha untuk menghindari tabrakan itu atau akibatnya (pertengkaran), merupakan bentuk perilaku sosial. Demikianpun dengan meniru perilaku orang lain, itu bukan perilaku sosial. Oleh Weber tindakan sosial dibagi menjadi 4 tipe, yaitu sebagai berikut:

a. Tindakan Rasional Instrumental

Tingkat rasionalitas paling tinggi ini meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan *tujuan* tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan atas dasar suatu kriterium menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaingan ini. Individu itu lalu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi. Hal ini mungkin mencakup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemkungkinan serta hambatan-hambatan yang terdapat dalam lingkungan, dan mencoba untuk meramalklan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan itu. Akhirnya suatu pilihan dibuat atas alat yang dipergunakan yang kiranya mencerminkan pertimbangan individu atas efisiensi dan efektivitasnya. Sesudah tindakan itu dilaksanakan, orang itu dapat menentukan secara obyektif sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Weber menjelaskan:

"*Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri (zweckrational) apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif.*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai

Dibandingkan dengan rasionalitas instrumental, sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar; tujuan-tujuannya ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau berupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai akhir bersifat nonrasional dalam hal di mana seseorang tidak dapat memperhitungkan secara obyektif mengenai tujuan-tujuan mana yang harus dipilih. Lebih lagi, komitmen terhadap nilai-nilai ini adalah sedemikian sehingga pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai kegunaan, efisiensi, dan sebagainya tidak relevan. Juga orang tidak memperhitungkannya (kalau nilai-nilai itu bersifat absolut) dibandingkan dengan nilai-nilai alternatif. Individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu, tetapi nilai-nilail itu sendiri sudah ada.

Tindakan religius mungkin merupakan bentuk dasar dari rasionalitas yang berorientasi nilai ini. Orang yang beragama mungkin menilai pengalaman subyektif mengenai kehadiran Allah bersamanya atau perasaan damai dalam hati atau dengan manusia seluruhnya suatu nilai akhir di mana dalam perbandingannya nilai-nilai lain menjadi tidak penting. Nilainya sudah ada, individu memilih alat seperti meditasi, doa, menghadiri upacara di gereja untuk memperoleh pengalaman religius. Apakah nilai itu dicapai secara efektif, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat "dibuktikan"secara obyektif dengan cara yang sama seperti kita membuktikan keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam tindakan instrumental.

c. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Kalau seorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, kalau diminta, dengan hanya mengatakan bahwa dia selalau bertindak dengan cara seprti itu atau perilaku seperti itu merupakan kebiasaaan baginya. Apabila kelompok-kelompok atau seluruh masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa persoalan. Satu-satunya pembenaran yang perlu adalah bahwa, " *inilah cara yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kami, dan begitu juga nenek moyang mereka sebelumnya; ini adalah cara yang sudah begini dan akan selalu begini terus*". Weber melihat bahwa tipe tindakan ini sedang hilang lenyap karena meningkatnya rasionalitas instumental.

d. Tindakan Afektif

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang mengalami perasaan meluap-meluap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektfif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya.[27]

Tindakan afektif atau emosional juga bisa dikatakan merupakan hasil konfigurasi khusus dari perasaan pribadi. Misalnya:

1) Simpati adalah suatu perasaan yang menghargai/menjunjung tinggi sesuatu. Hal ini melahirkan organisasi-organisasi sosial. Misalnya saat bencana, muncul beberapa organisasi-organisasi tertentu yang menangani bantuan atau mengkoordinir setelah itu bubar.
2) Empati, suatu imajinasi yang membayangkan dirinya pada posisi orang lain. Atau menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Misalnya membayangkan dirinya seorang presiden.
3) Cinta, adalah suatu tindakan yang sulit untuk diukur atau menentukan tindakan rasional.[28]

---

[27]http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_action&prev=/translate_s%3Fhl%3Did%26q%3Dteori%2Btindakan%2Bsosial%2Bmax%2Bweber%26tq%3Dtheory%2Bof%2Bsocial%2Baction%2Bmax%2BWeber%26sl%3Did%26tl%3Den (di akses tanggal 11 April 2009)

[28] http://gussri.blogspot.com/2008/05/max-weber.html (di akses tanggal 12 Mei 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait domain Pemilu Legislatif atau Pemilu Presiden telah banyak yang mengupas dan mengkajinya. Bentuk kajiannya pun bermacam-macam, ada yang melihat dari segi prosesnya, dari segi kecurangannya dan lain sebagainya. Adapun kajian kepustakaan yang membahas tentang Pemilu:

"Memantau Pemilu Mendorong Demokratisasi"

(Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur)[29]

Dalam buku tersebut menjelaskan seputar penyelenggaraan Pemilu 1999 yang pelaksanaannya tepat setelah jatuhnya rejim militer Soeharto, khususnya proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 1999 di Jawa Timur. Mengacu pada aturan hukum yang ditetapkan secara nasional, penyelenggaraan pemilihan umum di Jawa Timur mengikuti pentahapan sebagai berikut: (1) tahap pendaftaran dan penelitian partai politik peserta pemilihan umum, (2) tahap pendaftaran pemilih, (3) tahap pencalonan, (4) tahap kampanye pemilihan umum, dan (5) tahap pemberian dan perhitungan suara, serta penetapan hasil pemilihan umum.

Pada tahap pertama, pendaftaran dan penelitian partai politik, karena Komisi Pemilihan Umum belum terbentuk, maka fungsinya dijalankan oleh Tim 11. Hasil kerja Tim 11 menyatakan, dari 141 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman, 48 partai politik lolos uji verifikasi administratif dan faktual sehingga berhak ikut kompetisi dalam Pemilihan Umum 1999.

---

[29] Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur, *Memantau Pemilu Mendorong Demokratisasi*, Februari 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahap kedua, pendaftaran pemilih, juga belum menjadi objek pantauan yang komprehensif dari Forum Rektor Jawa Timur. Dalam proses yang berjalan, pendaftaran pemilih di Jawa Timur tidak bisa dimulai secara efektif sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada berbagai lokasi, pendaftaran pemilih baru dimulai dua hari sejak jadwal yang ditentukan. Kendalanya terletak pada persoalan-persoalan yang sangat teknis, seperti formulir pendaftaran belum terdistribusi ke Panitia Pendaftaran Pemilih, informasi tidak jelas mengenai tempat pendaftaran pemilih dan belum siapnya tenaga petugas pendaftar, yang terdiri atas wakil-wakil partai politik peserta pemilihan umum di daerah tersebut. Ada juga yang perwakilan partai pun belum diketahui, karena 48 partai tidak semuanya segera memiliki perwakilan hingga ke tingkat terendah.

Tahap keempat adalah kampanye pemilihan umum. Dari seluruh tahapan pemilihan umum, tahap ini dianggap paling krusial. Karena konstelasi politik yang berkembang mengarah pada polarisasi ideologi yang tajam diantara beberapa partai politik berbasis massa besar. Sementara itu, kampanye secara aktual memberi momentum memasifkan dan kian menajamkan polarisasi ideologi tersebut. Banyak analis mengkhawatirkan akan mencuatnya kekerasan politik atau rusuh di mana-mana. Dan, tidak ada satu pun diantara pimpinan partai politik di Jawa Timur yang menampik kekhawatiran tersebut. Juga, para pemerintahan, kepolisian dan militer di daerah ini merasa cemas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk pelanggaran kampanye yang agak menonjol di Jawa Timur adalah penggunaan uang (*money poltics*) untuk mempengaruhi sikap pemilih atau setidaknya untuk meramaikan dukungan terhadap partai poltik dalam kampanye arak-arakan. Juga, pelanggaran pengerahan massa dari satu daerah ke daerah lain untuk mengikuti kampanye.

Tahap kelima adalah pemberian, perhitungan dan penetapan suara. Pemberian suara adalah keputusan rakyat, penghakiman rakyat terhadap ambisi politisi. Dalam Pemilihan Umum 1999 rakyat telah berhasil menjadi hakim yang baik untuk memilah, mana-mana partai politik yang sekadar lahir untuk menumpang suasana reformasi, kendati menyelimuti diri dengan simbol-simbol ideologi dan slogan reformasi yang hebat-hebat dan mana-mana partai politik yang benar-benar mengakar dan bisa dipercaya untuk memperjuangkan nasib mereka. Dari 48 partai politik peserta pemilihan umum di Jawa Timur, rakyat –lewat perolehan suara- berhasil memilah secara tegas antara partai-partai besar yang dipersepsi sebagai partai rakyat sejati (lima besar partai yang mendapat suara terbanyak) dan partai-partai gurem.

Secara khusus, perolehan suara Pemilihan Umum 1999 lima partai politik besar di Jawa Timur untuk DPR-RI adalah sebagai berikut:

1. PKB mendapat 7.034.707 suara
2. PDI-P mendapat 6.703.699 suara
3. Golkar mendapat 2.510.025 suara
4. PPP mendapat 1.026.862
5. PAN mendapat 940.342 suara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Patut disayangkan bahwa keputusan rakyat tersebut sering kurang mendapat penghargaan setimpal di kalangan elite, khususnya elite partai politik. Hasil pemilihan umu hanya diakui "setengah hati", terutama oleh elite politik yang kalah dalam persaingan, yang kemudian dengan berbagai dalih dan usaha hendak mengurangi, mengaburkan dan merelatifkan makna menang kalah dalam pemilihan umum. Tidak jarang sentimen-sentimen emosional dieksploitasi dalam upaya mengaburkan makna hasil pemilihan umum tersebut. Kondisi ini sedikit banyak merupakan ironi, karena elite yang lebih terdidik, lebih berpengalaman, justru kurang dewasa dan kurang matang sikap politiknya dibanding massa yang sering direndahkan kesadaran politiknya. Cerminan terbaik atas hal ini adalah ulah beberapa partai gurem atau beberapa pecundang politik yang selalu mencoba-coba berbagai dalih dan upaya, antara lain, dengan menolak penandatanganan hasil perhitungan suara, serta minta jatah kursi di DPR meskipun perolehan suara partainya tidak mencukupi untuk memperoleh kursi.

Akhirnya, untuk kepentingan ke depan Forum Rektor perlu mengingatkan, baik kepada para pendukung dan kader partai politik maupun aparat pemerintah agar instropeksi dan lebih banyak belajar, karena dalam Pemilihan Umum 1999 lalu masih cukup banyak dijumpai pelanggaran dalam kategori substansial, seperti "penggunaan uang", "intimidasi", dan "tindak kekerasan" oleh kader atau pendukung partai, maupun ketidak netralan aparat pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penelitian yang dilakukan oleh Forum Rektor tersebut, perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian skripsi ini terletak pada penekanan objek yang diteliti. Apabila dalam Forum Rektor lebih menekankan di tahapan dan proses Pemilu, maka dalam penelitian skripsi ini lebih menekankan pada bagaimana tindakan masyarakat dalam merespon datangnya momentum Pemilu tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id